

## **Penguatan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Pola Relasi Sosial**

**Oleh:** Hayat

Universitas Islam Malang

Email: [hayat@unima.ac.id](mailto:hayat@unima.ac.id). [HP. 081333841083](tel:081333841083)

### **Abstract**

*Indonesia is a pluralistic and multicultural nation. Mutliculturalism in Indonesia is characterized by the recognition of religious diversity. Therefore, differences are owned by Indonesia is a realistic conception that should continue in the wake and be empowered, as a reinforcement to the life and well-being for the people of Indonesia are harmonious and dynamic. The purpose of this study was to describe the strengthening of the values of pluralism and describe and understand the relationship pattern social conducted by the government, religious and community leaders in the prevention of the onset of horizontal conflict. This research was conducted with qualitative research using descriptive approach, which describes the results of research appropriate to the purpose of research and followed by data analysis to obtain relevant and accurate data. Techniques of data collection are done by using literature review that support in answering this research problem. Horizontal conflict handling quite restrained and well. Aspects of tolerance have an important role of cooperation between the government and the religious leaders to support the acceleration of meaning and substance tolerance transformed into social life, so that conflicts can be avoided with a pattern horizontally comprehensively realization.*

*Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan multikultural. Mutlikulturalisme bangsa Indonesia ditandai oleh diakuinya keberagaman agama di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan konsepsi realitis yang harus terus dibangun dan diberdayakan, sebagai penguatan terhadap kehidupan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang harmonis dan dinamis. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan penguatan nilai-nilai pluralisme dan mendeskripsikan serta memahami pola relasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah, tokoh agama dan*

*masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap timbulnya konflik horizontal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan diikuti oleh analisis data untuk mendapat data yang relevan dan akurat. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka. Penanganan konflik horizontal cukup terkendali dan baik. Aspek toleransi mempunyai peran penting dari kerjasama pemerintah dan para tokoh agama untuk mendukung akselerasi dari makna dan substansi toleransi yang ditransformasikan ke kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga konflik secara horizontal dapat dihindarkan dengan pola relasi secara komprehensif.*

**Keywords:**

*Pluralism; social relations; horizontal conflicts; tolerance*

**Pendahuluan**

Multikulturalisme menjadi sesuatu yang khas bagi Indonesia. Dengan keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama Indonesia menjadi bangsa yang sejak awal mula lahir dengan sifat multikultural. Kesadaran pada realitas inilah yang kemudian membuat para pendiri bangsa (*the founding fathers*) merumuskan sebuah semboyan yang coba mengayomi semua tumpah darah Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang sejak awal pendirian republik menjadi nafas pembangunan bangsa. Dengan pegangan inilah arah pembangunan bangsa perlu memperhatikan kekhasan dan perbedaan yang ada. Pun demikian, dalam pola relasi sosial telah tercipta kesadaran untuk saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong di antara elemen bangsa yang berbeda.

Semangat inilah yang kemudian mampu menjaga Indonesia tetap berdiri tegak dari Sabang sampai Merauke. Meski demikian, perjalanan mempertahankan Indonesia yang multikultural tidak pernah sepi dan riak dan gelombang. Berbagai kasus intoleransi sering mewarnai perjalanan bangsa. Namun dengan kedewasaan bersikap dan kesadaran untuk terus

hidup bersama dalam harmoni membuat riak-riak itu relatif bisa diselesaikan dengan baik.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan realitas keberagaman sosial di Indonesia dengan segala problematika dan upaya perawatannya. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif tulisan ini mengkaji pola-pola relasi yang tercipta di masyarakat dalam menjaga kehidupan sosial multikultural yang harmonis.

### **Konflik SARA di Indonesia**

Meski Bangsa Indonesia memiliki karakter tolong menolong, saling menghormati, dan menjunjung prinsip Bhinneka Tunggal Ika, namun Toha dkk mencatat, pada tahun 1996 terjadi beberapa kali peristiwa konflik yang bernuansa sosial maupun agama, seperti kerusuhan di Situbondo tanggal 10 Oktober 1996, di Tasikmalaya 26 Desember 1996, di Karawang tahun 1997 dan Tragedi Mei pada tanggal 13-15 Mei 1998, yang terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang, Medan, beserta peristiwa-peristiwa kerusuhan lainnya.<sup>1</sup> Sementara itu, data dari Kemenag menambahkan peristiwa Jalan Ketapang Jakarta, kerusuhan di Kupang yang menyebar ke Ambon (Januari 1999), Ujung Pandang (1 April 1999), disusul konflik antar-etnis di Sambas Kalimantan Barat 1999, konflik Poso, dan Maluku Utara.<sup>2</sup>

Kasus pembakaran gereja di Halmahera pada 14-15 Agustus 2002, konflik Poso pada Desember 2003, penyerangan terhadap Huriah Kristen Batak Protestan (H.K.B.P) dan penyerangan terhadap rumah-rumah pengikut Ahmadiyah di Lombok pada September 2002, adalah bagian dari kasus-kasus konflik yang melibatkan unsur agama di dalamnya.<sup>3</sup>

Zuhairi Misrawi, menyatakan bahwa lembaganya (*Moderate Muslim Society/MMS*) pada Desember 2010 telah mencatat terjadi 81 kasus

---

<sup>1</sup> Suhermanto Toha, dkk. "Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama." Laporan Akhir Penelitian Hukum. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011. h. 1-2

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI. *Potret Kerukunan Umat Beragama DI Provinsi Jawa Timur*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011), h. 2

<sup>3</sup> Toha, "Eksistensi...." h. 2

intoleransi, meningkat 30 persen dari laporan tahun 2009 yang mencatat 59 kasus. Lebih lanjut dikatakan, dari 81 kasus tersebut, jenis kasus yang paling sering terjadi adalah 24 kasus penyerangan dan perusakan, 24 kasus penutupan dan penolakan rumah ibadah, 15 kasus ancaman, tuntutan dan intimidasi. Kemudian 6 kasus penghalangan kegiatan ibadah, 4 kasus diskriminasi karena keyakinan, 3 kasus pembubaran kegiatan atas nama agama, 3 kasus kriminalisasi paham keagamaan, dan 2 kasus pengusiran. Dari segi wilayah atau tempat, sepanjang tahun 2010 tindakan intoleransi paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat dengan 49 kasus, Jawa Timur dengan 6 kasus, DKI dengan 4 kasus, dan Sulawesi Selatan dengan 4 kasus.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Tedi, Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang (eLSA), pada semester pertama tahun 2014 ada 6 kasus kekerasan bernuansa agama atau intoleransi yang terjadi di Jawa Tengah. Keenam kasus tersebut adalah perusakan tempat sembahyang umat Hindu di Sragen, bentrok warga dengan FPI di Wonosobo, pembubaran Pengajian Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Demak, penolakan kedatangan Habib Rizieq di Demak, permasalahan pengajian Jantiko Mantab oleh Camat Grobogan, dan penangkapan terduga teroris di Klaten. Menurut eLSA, enam kasus itu patut dicermati. Sebab secara substansi, kasus intoleransi jenis itu bukan hal baru, seperti konflik yang melibatkan FPI yang mirip dengan yang terjadi di Kendal. Hanya motivasinya yang berbeda.<sup>5</sup>

Dari berbagai data diatas, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu konflik atau menghambat kerukunan umat beragama, menurut Agus Saputera<sup>6</sup> antara lain: (1) pendirian rumah ibadah yang tidak memperhatikan situasi dan kondisi secara sosial dan budaya lokal; (2) penyiaran agama yang bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa

---

<sup>4</sup> "Tindakan intoleransi naik 30%," dalam <http://www.menkokesra.go.id/content/tindakan-intoleransi-naik-30-persen%20>. (Diakses tanggal 9 Juni 2014).

<sup>5</sup> Anggi Kusumadewi dan Ryan Dwi, "2014, Ada Enam Kasus Intoleransi di Jawa Tengah," dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/509782-2014--ada-enam-kasus-intoleransi-di-jawa-tengah> (Diakses tanggal 9 Juni 2014)

<sup>6</sup> Agus Saputera, "Aktualisasi Kerukunan Umat Beragama," dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=262> (Diakses tanggal 9 Juni 2014)

agamanya sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami kebenaran agama lain; (3) bantuan luar negeri. Bantuan tersebut dapat juga memicu konflik baik intern maupun antar agama, karena biasanya menitikkan misi tertentu yang harus dilaksanakan; (4) perkawinan beda agama akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terutama menyangkut hukum perkawinan, warisan, harta benda, dan akidah; (5) perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan situasi, kondisi, dan lokasi masyarakat sekitar; (6) penodaan agama yang bersifat melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok; (7) kegiatan aliran yang menyimpang dari doktrin agama yang sudah diyakini kebenarannya ataupun kegiatan tersebut merupakan suatu aliran baru.

Faktor yang mempengaruhi konflik agama tersebut dinilai karena pola relasi yang dilakukan oleh tokoh agama kurang maksimal dijalankan, sehingga konflik semakin tidak terkendali, bahkan semakin meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh data-data di atas. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, diperlukan pola relasi sosial pemimpin agama atau tokoh agama sebagai panutan bagi kelompok yang berkonflik. Peran relasi sosial yang sinergi dan seimbang berdampak terhadap minimalisir adanya konflik yang berkepanjangan. Tokoh agama sebagai pengayom bagi pengikutnya, menjadi alternatif penting untuk mengatasi disharmoni antar umat beragama.

### **Pola Relasi Sosial dalam Konflik Horizontal**

Penelitian ini berangkat dari teori konflik yang berkembang melalui teori struktural fungsional yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan dan penyelesaian berbagai problematika kehidupan masyarakat. Goerge Ritzer dan Douglas J Goodman<sup>7</sup>, mengutip dari pemikiran Marxian tentang pemikiran konflik sosial yang tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural fungsionalnya. Lebih lanjut, teori fungsional, menurut Robert Nisbet yang dikutip dari Turner dan Maryanski menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup> George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 153

fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang.<sup>8</sup>

Pada saat ini, teori fungsional struktural menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan stabilitas masyarakat dalam menjaga dan mencegah konflik yang berkembang. Keberadaan struktural fungsional harus dikembangkan ke dalam kehidupan masyarakat yang multikultural untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Konflik yang berkembang di masyarakat, terjadi karena perbedaan yang tidak dinetralisir oleh fungsional struktur yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Kingsley Davis dan Wilbert Moore berpandangan bahwa masalah fungsional utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah bagaimana cara masyarakat memotivasi dan menempatkan individu pada posisi mereka yang tepat.<sup>9</sup> Individu yang dimaksud adalah menempatkan tokoh masyarakat di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk menjadi panutan dalam berbagai aspek karakter sosial.

Penempatan individu menjadi bagian dalam pencegahan, penanganan dan pengelolaan konflik yang ada, sehingga dapat dicapai sebuah kerangka sosial yang aman, adil, baik dan toleran. Terutama dalam kehidupan umat beragama yang sering terjadi gesekan karena perbedaan ideologi dan keyakinan. Hal ini menjadi tujuan utama dari konsep struktural fungsionalisme bagi tokoh agama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, yaitu melalui pola relasi sosial yang dilakukan.

Sementara itu, menurut pandangan Hayat,<sup>10</sup> merupakan sebuah dogma masyarakat terhadap struktural fungsional yang semakin luas dengan pelbagai perbedaan secara substantif yang mengikutinya, serta adanya perubahan dan perkembangan di dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan sebuah konflik ditimbulkan oleh adanya sebuah perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan itu tidak dipersepsikan sebagai

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 117

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 118

<sup>10</sup> Hayat, "Teori Konflik dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam dan Sosial." *Jurnal Hunafa*, vol 10, no 2, h. 271.

sebuah kemanfaatan di dalam kehidupannya, namun dipersepsikan sebagai bentuk penolakan terhadap perbedaan itu sendiri.

Seyogyanya, perbedaan mempunyai aktualisasi yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan sosial masyarakat, misalnya tolong menolong antar sesama, bekerjasama dalam berbagai kebutuhan, menciptakan stabilitas saling menghargai satu sama lain, dan menciptakan kondisi lingkungan kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas, untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Menurut penelitian Ramadhanita Mustika Sari, seperti yang dikutip Hayat,<sup>11</sup> mengungkapkan bahwa dalam menyikapi konflik dalam kaitan perbedaan identitas menurut sudut pandang kelompok adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok Primordialis, yang menilai bahwa perbedaan genetika seperti suku, ras, dan agama menjadi sumber utama dari sebuah gesekan antar kelompok yang mempunyai tujuan dan kepentingan di dalamnya. Sehingga benturan-benturan menjadikan konflik tidak dapat dihindari, dengan keinginan untuk mempertahankan eksistensi dari suatu kelompok itu sendiri. Perspektifnya adalah ketika kelompok merasa dirugikan, maka hal itu menjadi penentu timbulnya konflik.
- b. Kelompok Instrumentalis. Bagi kelompok ini suku, agama, dan ras merupakan media untuk mencapai tujuan dari kelompok itu sendiri, secara material maupun non material. Tujuan dan harapan dari kelompok tersebut menjadi keharusan untuk dicapai, baik secara individu ataupun kelompok di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Persinggungannya adalah jika beberapa kelompok dengan tujuan yang berbeda sesuai dengan capaiannya, maka konflik tidak dapat dihindarkan jika capaian itu tidak sesuai dengan harapan, dan menyalahkan kelompok lain sebagai penghambat dari tujuan kelompoknya.
- c. Kelompok Konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak kaku dan dapat diolah menjadi bentuk jaringan relasi sosial yang bagus. Setiap kelompok dalam kehidupan masyarakat sebagai

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 271-273

konektivitas untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Jaringan yang dibangun adalah dengan pola relasi yang seimbang dengan saling menguntungkan satu sama lain, sehingga capaian tujuan kelompok akan membantu kelompok lain.

### **Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Konflik**

Setiap agama mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial. Agama sebagai ideologi dan keyakinan umat beragama mempunyai tata aturan dan norma dalam bermasyarakat. Bangsa Indonesia dengan multikulturalitasnya memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, memberikan implikasi terhadap toleransi yang sangat tinggi dalam kebersamaan dan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, semakin meningkatnya pola hidup masyarakat saat ini, toleransi semakin terancam dan terkikis, banyaknya kepentingan pribadi dan golongan, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan etnis yang mengatasnamakan agama menjadi konflik berbau SARA (suku, ras, dan agama) semakin meningkat. Konflik meluas dengan berbagai paradigma dan perspektif yang ditimbulkan. Kelompok mayoritas seolah-olah menjadi penguasa di dalam dominasi keyakinannya, sementara minoritas bersikukuh mempertahankan keberadaan konflik sebagai jalan menuju tujuan dan kepentingan sesaat.

Anis Malik Toha dalam bukunya yang berjudul “Tren Pluralisme Agama”, seperti yang dikutip Agusni Yahya,<sup>12</sup> menuturkan bahwa pluralisme agama adalah keadaan kondisi hidup yang bersamaan (koeksistensi) dalam satu lingkungan antar umat beragama yang berbeda-beda dengan mempertahankan sifat, prinsip, ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.

---

<sup>12</sup> Agus Yahya, “Fiqh Al-Hadits Ibn Taimiyah Tentang Pluralisme Agama”. *Jurnal Substantia*, vol. 12 no. 1 tahun 2011, h. 10.

Menurut Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni<sup>13</sup> bahwa Konflik antar umat beragama akan terus berlangsung, hal itu dikarenakan antara lain: (1) menguatnya radikalisme, fundamentalisme dan terorisme; (2) belum optimalnya kedewasaan masyarakat dalam beragama. Ditambah peran serta masyarakat yang rendah dalam menjaga toleransi agama; (3) belum adanya pelaksanaan dari UUD Negara Republik Indonesia pasal 29; (4) penegakan hukum yang mengalami kegamangan jika terjadi konflik keagamaan.

Sementara itu, peran tokoh agama menjadi terabaikan ketika konflik melanda. Para tokoh agama membela pada kelompoknya masing-masing, sehingga menghilangkan peran ketokohnya sebagai pengayom dan pelindung bagi seluruh masyarakat.

Perlu dilakukan sebuah relasi sosial antar tokoh agama di dalam kehidupan berwarganegara dan bermasyarakat. Pola relasi sosial antar tokoh agama dapat dilakukan pada agenda-agenda penting kemasyarakatan untuk memperkokoh toleransi dalam kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat, dan meminimalisir saling kecurigaan antar kelompok agama. Pun demikian, pola relasi antar tokoh agama menjadi media pencegah timbulnya konflik antar umat beragama, sehingga relasi harmoni dalam berbangsa dan bernegara dapat dicapai untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Peningkatan Toleransi Agama dalam Kajian Agama dan Sains**

Penelitian dan kajian tentang pola relasi sosial keagamaan untuk penguatan terhadap toleransi agama telah banyak dilakukan oleh para akedemisi dan peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh *Center fo Religious and Cross-culture Studies* (CRCS) UGM tentang Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia, mengungkapkan bahwa penting bagi kelompok mayoritas untuk meningkatkan etika toleransi bagi setiap umat beragama dalam peningkatan terhadap kehidupan masyarakat yang lebih baik.

---

<sup>13</sup> Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni. "Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama". *Jurnal Walisongo*, vol. 22. no. 2 Tahun 2014, h. 352.

Sementara bagi minoritas penting untuk memperhatikan kearifan dalam berkomunikasi dengan kelompok lain. Bagi kelompok keagamaan yang ingin mendirikan rumah ibadah, diharapkan untuk menyelesaikan surat izinnya, kerap ada keluhan dalam perizinan, tapi adanya izin menghilangkan alasan untuk tidak terpenuhinya hak beribadah. Tanpa semangat toleransi dan kearifan, konflik antar agama semakin sulit dihindari.<sup>14</sup>

Sedangkan untuk masalah konflik penodaan dan penistaan agama, harus mementingkan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi warga pengungsi Ahmadiyah di Mataram oleh negara. Satu hal yang penting untuk dilakukan adalah menciptakan situasi yang kondusif tanpa intimidasi, kekerasan, dan situasi aman. Sedangkan yang menjadi catatan dari berbagai kasus di atas adalah peran pemerintah daerah yang kerap tunduk pada desakan massa, bahkan melanggar hukum dan putusan peradilan sekalipun.

Kajian lain terkait dengan relasi sosial antar umat bergama juga dilakukan oleh Ahmad Munjin Nasih dan Dewa Agung Gede Agung, yang menitikberatkan pada pola relasi umat Islam dan umat Hindu dalam kerangka penguatan terhadap toleransi agama di Malang Raya. Umat Hindu di Malang Raya merupakan komunitas minoritas, di mana secara umum mereka tinggal di kawasan pedesaan yang terletak di pinggiran kota. Selama ini relasi umat Hindu dengan umat Muslim sebagai umat mayoritas terjalin dengan baik dan harmonis. Salah satu indikatornya adalah dalam kurun waktu yang sangat lama hampir tidak pernah terdengar ada benturan horizontal antarumat sehingga mengganggu hubungan keduanya.

Hal mendasar yang menjadi penyebab keharmonisan hubungan keduanya adalah adanya saling pengertian dan toleransi, serta dibentuknya sistem sosial yang disepakati bersama tanpa mengorbankan akidah masing-masing. Setidaknya terdapat empat kegiatan yang dilakukan oleh umat Muslim dan Hindu secara turun temurun yang menyebabkan mereka bisa

---

<sup>14</sup> Lihat Bagir, Zainal Abidin, dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2010).

hidup rukun dan harmonis yaitu: 1) kegiatan desa, 2) kegiatan kenegaraan; 3) kegiatan keagamaan; dan 4) kegiatan pelestarian budaya lokal.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Ebin E. Danius,<sup>16</sup> yang membahas tentang hubungan Kristen-Islam pasca konflik di Tobelo Halmahera Utara, menunjukkan bahwa relasi Kristen-Islam telah mengalami proses kemunduran sebagai akibat dari beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hubungan antar agama. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini hanya merupakan faktor pemicu yang memberikan legitimasi bagi pembatasan hubungan antar agama. Faktor yang paling menentukan sebenarnya adalah berkembangnya ajaran-ajaran agama yang berdampak pada kecurigaan tertentu dari masing-masing pihak. Dengan kecurigaan yang demikian maka semua hal yang dilakukan oleh pihak lain dianggap sebagai sebuah upaya untuk mempengaruhi keyakinan agama yang dipegang oleh mereka.

Upaya untuk menjalin relasi kembali sesudah konflik dilakukan dengan pendekatan kekerabatan dan ikatan kesukuan. Dalam beberapa hal pendekatan seperti ini cukup berhasil dalam menjembatani hubungan dua komunitas yang pernah berhadapan dalam konflik. Namun juga tidak bisa disangkal bahwa pengalaman konflik mendatangkan trauma tertentu yang berdampak pada kecurigaan-kecurigaan dari masing-masing pihak. Agama masing-masing komunitas dalam hal ini tetap menjadi sandaran utama dalam berhadapan dengan pihak lain yang berbeda agama.

Kurang berhasilnya proses rekonsiliasi dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam menjalin kembali relasi yang telah rusak berdampak pada ketegangan tertentu yang ada dalam masyarakat menyangkut isu-isu tertentu yang muncul. Perhatian besar diberikan pada birokrasi pemerintahan dan pada bidang politik praktis membuat masyarakat seringkali terkotak-kotak dalam sekat-sekat agama ketika proses tertentu terjadi dalam dua hal tersebut. Tingkat kecurigaan masyarakat masih begitu tinggi. Kecurigaan ini melahirkan sikap mendua dalam upaya untuk membangun kembali hubungan antar masyarakat yang rusak akibat

---

<sup>15</sup> Ahmad Munjin Nasih dan Dewa Agung Gede Agung, "Harmoni Relasi Sosial Umat Muslim dengan Hindu di Malang Raya". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, vol 24 no 2 tahun 2011.

<sup>16</sup> Ebin E Danius, "Hubungan Kristen-Islam Pasca Konflik di Tobelo Halmahera Utara." *Jurnal Uniera*, vol 1 no 1, Tahun 2012.

konflik. Pendekatan keluarga dan suku tidak menjamin secara baik bahwa relasi tersebut pulih.

Dalam banyak hal sikap dan tindakan komunitas Kristen pada Islam merupakan sebuah sikap penolakan pada hegemoni umat Islam dalam konstelasi politik Maluku Utara. Identitas Kristen dalam hal ini muncul sebagai pembeda yang mempersatukan umat Kristen di Halut dalam berhadapan dengan pengaruh kepentingan penguasa Provinsi dan umat Islam.

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa toleransi agama di Indonesia masih dapat terjaga secara baik dan komprehensif, karena korelasi dan konektivitas antara tokoh-tokoh agama di Indonesia mendukung pola pencegahan dini terhadap timbulnya konflik. Hal ini juga diperkuat oleh sistem dan tatanan serta dukungan pemerintah dalam membangun kerjasama dengan para tokoh agama serta memperkuat aspek kehidupan sosial di masyarakat.

Penguatan nilai-nilai pluralisme melalui pola relasi sosial antar tokoh agama dan pemerintah serta masyarakat mempunyai implikasi sangat besar bagi kehidupan keagamaan masyarakat. Di samping saling menjaga keharmonisan antar umat beragama, hal itu dapat menjaga dan mengkonter hal-hal yang dapat ditimbulkan dari gejala-gejala yang muncul dengan menerapkan komunikasi, koordinasi dan koreksi dapat membantu pemerintah mencegah keberadaan konflik horizontal antar umat beragama.

Di samping kedewasaan pemikiran masyarakat atas upaya toleransi dapat dikatakan berhasil. Semua stakeholder bekerjasama membangun kepercayaan melalui pemahaman secara toleran terhadap dinamika kehidupan masyarakat, sebagai simbol utamanya adalah regulasi tempat ibadah sebagai ekspektasi kekuatan toleransi sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat Kota Malang. Semoga menjadi pembelajar bagi kita semua, bahwa toleransi agama itu penting untuk penguatan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta membangun harmonisasi yang seimbang dan setara antar umat beragama dalam membangun peradaban bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Bagir, Zainal., dkk. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2010.
- Danius, Ebin E. “Hubungan Kristen-Islam Pasca Konflik di Tobelo Halmahera Utara.” *Jurnal Uniera*, vol 1 no 1, Tahun 2012.
- Hapsin, Abu., Komarudin, dan Imroni, M. Arja. “Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama”. *Jurnal Walisongo*, vol. 22. no. 2 Tahun 2014.
- Hayat. “Teori Konflik dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam dan Sosial.” *Jurnal Hunafa*, vol 10, no 2, h. 271.
- Kantor Departemen Agama. *Kota Malang dalam Malang Angka 2011*. Malang: Kandepag, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Potret Kerukunan Umat Beragama DI Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011.
- Kusumadewi, Anggi dan Dwi, Ryan. “2014, Ada Enam Kasus Intoleransi di Jawa Tengah,” dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/509782-2014--ada-enam-kasus-intoleransi-di-jawa-tengah> (Diakses tanggal 9 Juni 2014)
- Nasih, Ahmad Munjin dan Agung, Dewa Agung Gede. “Harmoni Relasi Sosial Umat Muslim dengan Hindu di Malang Raya”. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, vol 24 no 2 tahun 2011.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Saputera, Agus. “Aktualisasi Kerukunan Umat Beragama,” dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=262>. (Diakses tanggal 9 Juni 2014)
- Toha, Suhermanto., dkk. “Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama.” Laporan Akhir Penelitian Hukum. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

## Hayat

Yahya, Agus. “Fiqh Al-Hadits Ibn Taimiyah Tentang Pluralisme Agama”. *Jurnal Substantia*, vol. 12 no. 1 Tahun 2011.

“Tindakan intoleransi naik 30%,” dalam <http://www.menkokesra.go.id/content/tindakan-intoleransi-naik-30-persen%20>. (Diakses tanggal 9 Juni 2014).